



**PERAN PEMERINTAH THAILAND DALAM MENANGGULANGI
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI THAILAND**

Maulida Nila Cahyaning Widhi

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Tourism in Thailand has become a special attraction for local and foreign tourists to visit Thailand, especially for the purpose of sex tourism. The large number of sex tourists for sex tourism in Thailand is growing. Many children in Thailand who become child labor especially become Commercial Sex Workers (CSWs). One of reason why this happened caused by the development of tourism sector in Thailand. Children who work as prostitutes are one form of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC). CSEC is one of the transnational crimes in which the crime of CSEC can be done in one country or more. This study aims to find out what is done by the government and the impact experienced by victims. The results obtained in this study are the Government of Thailand to make Child Protection Act and Anti-Trafficking in Person Act as one of the real forms of child conversion.

Keywords: role of government, crime of child sexual exploitation, Thailand

PENDAHULUAN

Eksplorasi seksual komersial anak adalah sebuah proses dimana anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial dan merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern. Diidentifikasi pertama sekali sebagai sebuah masalah global pada Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang dilaksanakan di Stockholm pada tahun 1996. ESKA merupakan sebuah masalah kompleks yang membutuhkan intervensi-intervensi khusus dan perhatian penuh dari masyarakat dunia (ECPAT Internasional, 2008: 3).

ESKA juga tidak hanya mencakup prostitusi saja, tetapi pornografi, perdagangan anak dan eksploitasi anak untuk tujuan seksual. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual merupakan bentuk-bentuk dari eksploitasi seksual komersial, dimana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak-hak anak.

Sebanyak 1,8 juta anak dieksploitasi untuk prostitusi dan pornografi di seluruh dunia dan perdagangan anak sendiri merupakan sebuah industri ilegal yang menghasilkan milyaran dolar Amerika Serikat. Perdagangan seks komersial anak dan remaja telah meluas baik dalam bentuk kejahatan terorganisir maupun tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri sehingga hal ini menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia. Thailand sendiri menjadi tujuan untuk wisata seks sejak akhir tahun 1970-an. Hal ini disebabkan karena konsumen prostitusi di kawasan itu sangat bebas. Berawal dari kehadiran militer Amerika yang beristirahat dan melakukan cuti untuk rekreasi selama Perang Vietnam sejak tahun 1962, yang kemudian menjadi salah satu faktor dari berkembangnya industri seks di Thailand, yang meliputi prostitusi, pornografi, dan perdagangan manusia. Meskipun sebagian besar dari pembeli seks ini berasal dari warga lokal, turis mancanegara juga memiliki proporsi yang signifikan dalam hal ini (ECPAT International, 2012: 12).

Pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa yang diandalkan oleh Thailand sejak awal industri ini dibuka, bersanding dengan industri perbankan sebagai penyumbang devisa kedua terbesar di bidang jasa di Thailand. Namun di sisi lain, industri pariwisata ini memiliki dampak negatif untuk Thailand terutama dalam pariwisata seks anak (Lestari; Anom Wiranata; Kawitri Resen; 2014: 1). Pariwisata di Thailand telah menarik beberapa investor asing untuk melakukan investasi. Hal ini diperkirakan akan meningkat sebesar 5,4% pada tahun 2015 dan akan naik 6,0% selama sepuluh tahun ke depan menjadi THB (Thailand Baht) 444.2 *billion* (milyar) (www.wttc.org).

Banyaknya wisatawan seks dalam jumlah besar membuat *sex tourism* di Thailand semakin berkembang (ECPAT International, 2011: 9). Menurut lembaga riset yang berbasis di AS "*Protection Project*", perkiraan jumlah anak-anak korban prostitusi di Thailand berkisar 12.000 anak. Perkiraan pemerintah mengungkapkan bahwa lima persen dari anak-anak tersebut adalah laki-laki (www.ecpat.net). Di sisi lain dari perdebatan ini banyak LSM memperkirakan jumlah korban ESKA berada di ratusan ribu. Laporan lain memperkirakan jumlah anak korban prostitusi menjadi setidaknya 80.000 anak (www.unicri.it).

Ada beberapa wilayah dari Thailand yang sangat terkenal dengan prostitusi anak, yaitu seperti Pattaya, Patong di Phuket, dan kota di bagian utara Thailand, Chiang Mai (www.resourches.ecpat.net). Tempat-tempat yang sering dijadikan sebagai sarana prostitusi dan eksploitasi seksual adalah karaoke, panti pijat, hotel dan bahkan restoran (ECPAT International, 2013: 13).

Thailand sendiri sudah mengeluarkan Undang-Undang tentang pelarangan prostitusi yang sudah aktif sejak tahun 1996 serta Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia yang didirikan pada tahun 2008 (ECPAT International, 2013: 15). Thailand memiliki beberapa mekanisme yang berhubungan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi seksual, seperti *the National Committee on Trafficking* yang terdiri dari berbagai departemen pemerintah dan kementerian dan LSM di tingkat nasional. Pada tingkat operasional ada *Anti-Human Trafficking Division* (AHTD) dari kepolisian Thailand, *Royal Thai Police* (RTP), *the Centre Against Human Trafficking* (CAHT) dari Kantor Jaksa Agung dan Biro untuk

mencegah dan menekan perdagangan manusia dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia (ECPAT International, 2013: 16).

Di masa lalu, beberapa negara memandang wisata seks, termasuk eksploitasi seksual anak, sebagai satu komponen di dalam program pembangunan pariwisatanya. Sekarang, pemerintahan yang mengizinkan penyelenggaraan wisata seks semakin sadar bahwa hal tersebut merusak citra bangsa dan berbagai upaya dilakukan untuk mengubah citra negative yang sudah terlanjur melekat (ECPAT International, 2005: 11). Menyadari seriusnya masalah prostitusi anak serta dampak negatifnya yang berlangsung lama, pemerintah Thailand mengambil langkah tegas menolak ESKA dalam bidang pariwisata (ECPAT International, 2005: 11).

PEMBAHASAN

Upaya pemerintah Thailand dalam memerangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand

Thailand melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yaitu, Konvensi ILO atau *Worst Form of Child Labour Convention* nomor 182 tentang pekerja anak, *Convention on the Rights of the Child (CRC), Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* untuk mengurangi jumlah eksploitasi seksual komersial anak. Salah satu bentuk implementasi dari pemerintah Thailand karena telah meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah dengan membuat Undang-undang mengenai anak yang dikenal dengan *Child Protection Act* pada tahun 2003. Undang-undang dalam pasal ini berlandaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB. Selain itu untuk mengurangi jumlah prostitusi anak yang awalnya menjadi korban *trafficking*, pemerintah Thailand merumuskan kebijakan *Anti-Trafficking in Persons Act*. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan perbaikan dari *Prevention and Supression of Trafficking in Women and Child Act* tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengkoordinir semua keselamatan manusia terhadap *human trafficking* terutama laki-laki (www.humantrafficking.org).

Thailand melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya dan mengubahnya menjadi *The Anti-Trafficking in Persons Act* pada tahun 2008. Undang-undang tersebut fokus kepada kasus perdagangan manusia. Kebijakan nasional tersebut meliputi instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia seperti protokol perdagangan manusia dari PBB. Pemerintah Thailand terus berusaha membuat kebijakan lanjutan untuk memperbaiki dan menguatkan undang-undang sebelumnya, seperti *The National Plan of Action (NPA) to Eliminate the Worst Forms of Child Labor (2009-2014)*, dan *The National Policy, Strategy, and Measures for the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons (2011-2016)* (www.dol.gov).

Bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand

Ada lima (5) bentuk ESKA di Thailand yaitu, 1.) Pelacuran Anak; pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual.

Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi. Eksploitasi seksual komersial anak melalui pelacuran merupakan masalah global dan terkait dengan pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan-tujuan seksual. Permintaan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak bisa datang dari para pelaku eksploitasi yang datang dari dalam maupun luar negeri (ECPAT Internasional, 2013: 5). 2.) Pornografi Anak; Pornografi anak berarti pertunjukan apapun dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktifitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual. Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio serta tulisan yang dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film kaset video, handphone serta disket atau file komputer.

Tujuan utama dari pornografi anak adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual. Biasanya ada sekelompok orang dewasa yang termasuk pedofilia yang dapat terangsang seksualitasnya bila melihat gambar-gambar anak dalam keadaan tidak mengenakan pakaian (ECPAT Internasional, 2013: 7). 3.) Perdagangan Anak; Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan karena anak-anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi terhadap diri mereka. Anak-anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi ilegal. Semua anak korban *trafficking* telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka (ECPAT Internasional, 2013: 8). 4.) Pariwisata Seks Anak; Pariwisata seks anak merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang atau orang-orang yang melakukan perjalanan dari daerah, wilayah geografis atau negara asal mereka untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Para wisatawan seks anak bisa wisatawan domestik atau wisatawan internasional.

PSA (Pariwisata Seks Anak) sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata terkait lainnya yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar. Pariwisata seks anak melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir (ECPAT Internasional, 2008: 6). 5.) Perkawinan Anak; Perkawinan anak atau pernikahan dini (pernikahan anak-anak usia dibawah 18 tahun) dapat dianggap sebagai sebuah bentuk eksploitasi seksual komersial anak jika anak yang dinikahkan tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas nafsu seks dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lain. Oleh karena itu, perkawinan anak juga dapat menjadi sebuah bentuk PSA. Negara-negara yang masih sering lazim melakukan perkawinan anak adalah kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan dimana seorang warga negara dari sebuah negara melakukan perjalanan ke negara lain untuk menikahi seorang anak perempuan

dengan imbalan uang atau bentuk-bentuk kebaikan lain kepada orang tua, menghabiskan waktu selama seminggu bersama dengan gadis kecil tersebut kemudian menelantarkannya dan kembali lagi ke negara asalnya dan tidak pernah berhubungan lagi dengan anak tersebut maupun keluarganya (ECPAT Internasional, 2008: 22).

Faktor-faktor terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Thailand

ESKA terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti faktor kemiskinan, budaya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan permintaan dari wisatawan asing terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual. Pada awal dibukanya pariwisata di Thailand, wisatawan Amerika, Australia dan Eropa menjadi sumber utama permintaan terhadap anak sebagai komoditas seks di Thailand. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi di Asia, di tahun 2000-an, wisatawan regional baik Tiongkok, Jepang dan Korea turut serta menjadi sumber dari permintaan terhadap anak sebagai komoditas seks (Lestari; Anom Wiranata; Kawitri Resen; 2014: 3).

Anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran didorong dengan adanya keinginan untuk dapat bertahan hidup. Namun, mereka juga terpaksa untuk terlibat ke dalam dunia prostitusi tersebut karena didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi dimana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada mereka. Semua anak-anak rentan terhadap eksploitasi seksual komersial anak, tapi sebagian anak memang jauh lebih rentan dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Seperti 1.) anak-anak tanpa pengasuhan orang tua seperti anak yatim-piatu dan anak-anak terpisah dengan orang tua mereka, anak-anak yang tinggal sendiri, anak-anak yang tinggal dengan keluarga angkat atau anak-anak yang tinggal dalam institusi menghadapi bahaya yang besar karena kurangnya dukungan dan perlindungan orang tua dan masyarakat. 2.) Anak-anak cacat fisik dan anak-anak cacat mental serta anak-anak dengan “kebutuhan khusus”. Anak-anak ini pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menghindari kekerasan atau untuk memahami apa yang akan terjadi kepada mereka dan menceritakan kekerasan tersebut. 3.) Anak-anak dari kelompok yang termajinalkan seperti anak-anak dari etnis, suku dan komunitas agama minoritas. Anak-anak seperti ini sering mengalami dampak ekonomi yang merugikan karena diskriminasi yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi atau mungkin tidak mendapatkan perlindungan karena kerangka hukum dan kebijakan yang lemah. Jadi, anak-anak macam ini memang jauh lebih rentan terhadap eksploitasi seksual komersial anak karena memang posisi mereka yang lemah serta kurangnya perlindungan dari keluarga maupun masyarakat, sehingga mereka merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap ESKA dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih (ECPAT Internasional, 2008: 14).

Dampak-dampak dari ESKA pada korban dan Thailand

Dampak-dampak yang dialami oleh para korban adalah seringkali mengalami stigmatisasi dari masyarakat dan mengalami kesulitan untuk

mendapatkan pendidikan formal maupun informal. Mereka tidak mendapatkan dukungan masyarakat, tidak mengalami interaksi sosial yang sama ataupun tidak berkembang sebagai anggota masyarakat sebagaimana anak-anak yang lain. Karena alasan-alasan ini maka lebih sulit bagi para korban ESKA untuk dapat mendukung diri mereka sendiri secara financial atau untuk dapat hidup secara independen dalam kehidupan mereka ketika mereka dewasa kelak. Dampak pariwisata seks anak terhadap anak-anak memang sangat serius pada kesehatan, kesejahteraan dan berbagai kesempatan di masa yang akan datang terancam oleh eksploitasi yang telah mereka alami. Jadi, jarang pernah ada wisatawan yang berpikir bahwa bentuk kontak seksual apapun dengan seorang anak tidak akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap anak tersebut ataupun berpikir bahwa kontak seksual tersebut dapat diterima jika anak tersebut ditukar dengan uang atau bentuk imbalan lainnya (ECPAT Internasional, 2008: 16).

Sedangkan dalam sektor destinasi atau obyek wisatanya, keberadaan ESKA dalam sektor pariwisata akan sangat merusak citra bangsa dan menurunkan kualitas produk wisatanya. Apabila suatu negara sudah terlanjur memiliki citra yang negative maka manfaat ekonomi dari pariwisata akan berkurang karena wisatawan segan berkunjung dan memilih negara lain untuk tujuan wisatanya (ECPAT Internasional, 2008: 14). Pariwisata yang dibuka oleh Thailand bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan devisa yang diandalkan Thailand sejak awal industri ini dibuka yang bersanding dengan industri perbankan sebagai penyumbang devisa kedua terbesar di bidang jasa di Thailand. Namun di sisi lain, Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) oleh wisatawan asing merupakan salah satu dampak negative yang diterima Thailand dari dibukanya pariwisata di Thailand di awal tahun 1980-an (ECPAT International, 2011).

Kerjasama Nasional dan Internasional yang Dilakukan Pemerintah Thailand

Salah satu bentuk kerjasama nasional yang dilakukan pemerintah Thailand ini adalah membentuk pusat rehabilitasi bagi korban ESKA. Pusat-pusat tersebut didirikan oleh pihak Kepolisian yang bekerjasama dengan LSM demi menyediakan ruang rehabilitasi untuk anak-anak dan perempuan yang telah menjadi korban ESKA. Selain memberikan rehabilitasi, pusat-pusat tersebut juga digunakan untuk menyelidiki perilaku korban kekerasan seksual (ECPAT International, 2011: 16).

Thailand telah aktif dalam kerjasama bilateral maupun multilateral dalam mengatasi *human trafficking*, seperti *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* (COMMIT) yang didukung oleh *United Nations Inter-Agency Project against Human Trafficking* (UNIAP) yang menjadikan kerjasama ini sebagai kerjasama Thailand dengan negara-negara tetangga Thailand (ECPAT International, 2011: 19).

Pada tahun 2004, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Tiongkok membentuk kerjasama multilateral *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* (COMMIT). Upaya penanggulangan *human trafficking* dirumuskan melalui konsultasi dengan *COMMIT Task Forces*, PBB, NGO, lembaga donator dan direalisasikan ke dalam *COMMIT Sub-*

Regional Plan of Action (COMMIT SPA) di bawah kerangka dokumen MoU COMMIT 2004 (UNIAP, 2007: 5).

Selain itu, Thailand juga bekerjasama dengan salah satu organisasi internasional seperti *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2006 dalam bentuk buku panduan yang membahas tentang masalah pekerja imigran, dan juga membangun berbagai fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan dan proses penyerahan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban (www.ilo.org). Masalah ESKA juga menarik perhatian organisasi non-internasional seperti *End Child Prostitution and Trafficking for Sexual Purposes* (ECPAT) dan Thailand juga memulai kerjasama dengan organisasi ini.

KESIMPULAN

Pemerintah tidak hanya menyusun Undang-Undang yang berkaitan dengan ESKA namun pemerintah Thailand membentuk pusat rehabilitasi bagi korban ESKA. Pusat-pusat tersebut didirikan oleh pihak Kepolisian yang bekerjasama dengan LSM demi menyediakan ruang rehabilitasi untuk anak-anak dan perempuan yang telah menjadi korban ESKA. Thailand juga aktif dalam kerjasama bilateral maupun multilateral seperti kerjasama antara Thailand dengan Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Tiongkok yang terbentuk dalam *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* (COMMIT). Kerjasama ini dilakukan untuk memerangi *human trafficking* yang terjadi di sepanjang Sungai Mekong, Asia Tenggara. Selain melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, Thailand melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti ILO yang membahas tentang masalah pekerja imigran dan juga membangun berbagai fasilitas pendukung seperti tempat transit, perlindungan dan proses penyerahan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban. Organisasi non pemerintah seperti ECPAT pun turut menjadi salah satu aktor yang membantu Thailand dalam memerangi ESKA di Thailand.

Referensi

- ECPAT International, (2008). *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab*. Dipetik pada 15 Juni 2016. Dari http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/cst_faq_bahasa.
- Eka Mulyana Lestari, I Made Anom Wiranata, S,IP., M.A, Putu Titah Kawitri Resen, S.IP., M.A. (2014). *Peran ECPAT dalam menangani CSEC oleh Wisatawan Asing di Thailand*. Dipetik pada 8 Mei 2018. Dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/11620>.
- WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL. (2015). *Travel & Tourism: Economic Impact 2015 Thailand*. London: WTTC.
- ECPAT International. (2011). *Global Monitoring Status and Action against Commercial Sexual Exploitation of Children*. Bangkok: ECPAT Internasional.
- ECPAT, (1996). *Declaration and Agenda for Action: 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, Stockholm, Sweden*. Dipetik

- pada 14 September 2018. Dari http://www.ecpat.net/sites/default/files/stockholm_declaration_1996.
- UNICRI, (2015). *Countering Emerging Threats and Challenges of Transnational Organized Crime Stakeholders' Meeting in Thailand*. Dipetik pada 14 September 2018. Dari http://www.unicri.it/news/article/Countering_Emerging_Threats.
- ECPAT International. *What We Do, The Body Shop, Fact Sheet Thailand: Stop The Trafficking of Children and Young People*, merupakan sebuah program kampanye untuk menghentikan perdagangan anak yang terjadi di dunia. Merupakan kerjasama antara ECPAT dan *The Body Shop*. Dipetik pada 10 Januari 2018. Dari <http://www.ecpat.net/what-we-do.pdf>.
- ECPAT International, (2013). *Protection of Children Against Sexual Exploitation in Tourism*. Dipetik pada 15 September 2018. Dari <http://www.defenceforchildren.nl>.
- ECPAT International, (2013). *Protection of Children Against Sexual Exploitation in Tourism*. Dipetik pada 15 September 2018. Dari <https://www.defenceforchildren.nl/images/13/2817>.
- ECPAT UK, (2005). *Child Sex Tourism in Thailand*, Grosvenor Gardens, London. Dipetik pada 17 September 2018. Dari <http://www.ecpat.org.uk/sites/default/files/thailand05>.
- ECPAT International, (2006). *Protecting Children from Sexual Exploitation & Sexual Violence in Disaster & Emergency Situations*. Dipetik pada 17 September 2018. Dari http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/ecpat_06_pcfseasvie_situations.
- Human Trafficking Report: Thailand. Dipetik pada 17 September 2018. Dari www.humantrafficking.org/countries/thailand.
- Thailand: (2014). *Findings on the Worst Forms of Child Labor, Significant Advancement*. Diakses pada 17 September 2018. Dari <http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/thailand>.
- ECPAT International. (2011). *Global Monitoring Status and Action against Commercial Sexual Exploitation of Children*. Bangkok: ECPAT Internasional.
- United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking. (2007). *The COMMIT Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA): Achievements in Combating Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-Region, 2005-2007*.
- ILO International. International Labour Organization. Dipetik pada 17 September 2018. Dari <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.html>.
- ECPAT International. (2012). *Annual Report July 2011-2012*. Bangkok: ECPAT International.

